



## Pemberitaan Surat Kabar Berita Yudha dalam Melawan Propaganda Komunis Setelah Gerakan 30 September 1965

*Berita Yudha Newspaper Containing of Communist Propaganda After the 30th Of September 1965 Movement*

Harry Farinuddin<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup>✉ Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

E-mail: [harryfarinuddinsimamora@gmail.com](mailto:harryfarinuddinsimamora@gmail.com)✉

Diterima: 20 Juli 2023

| Direvisi: 30 November 2023

| Diterbitkan: 2 Desember 2023

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords:

*Berita Yudha, Sukarnoism Supporting Agency, 30th September of 1965 Movement, Nasakom, Affiliated Media.*

*This study examines the Berita Yudha newspaper's coverage of the 30th September Movement (G30S) and its role in countering Indonesian communist propaganda. Berita Yudha, an Indonesian Army (TNI-AD) affiliated newspaper, served as a conduit between the TNI-AD and the public, fostering resilience against communist ideologies. The newspaper's establishment as a rival to communist media stemmed from the involvement of former Berita Indonesia employees, a Sukarnoism Supporting Agency (BPS) alliance member, in its founding. Due to its anti-communist stance, Berita Indonesia was disbanded, and its affiliated media were banned. Employing the historical research method, this study encompasses four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources include Berita Yudha and Harian Rakjat newspapers, supplemented by books, magazines, and online and offline research journal articles. The study reveals Berita Yudha's effectiveness in countering communist propaganda, capitalizing on its unique position as the sole newspaper permitted to publish following the G30S and Harian Rakjat's propagative reporting. Berita Yudha's factual reporting of the G30S events countered Harian Rakjat's distorted narrative, exposing the PKI's role as the event's mastermind. This study's novelty lies in its revelation of Berita Yudha's strategic utilization of its privileged position as one of two authorized newspapers to factually report the G30S, exposing the PKI's involvement. The study sheds light on the BPS's anti-communist stance and the TNI-AD affiliated media's role in addressing the G30S.*

#### Kata Kunci:

*Berita Yudha, Badan Pendukung Sukarnoisme, Gerakan 30 September 1965, Nasakom, Media Afiliasi.*

Penelitian ini mengkaji peliputan surat kabar *Berita Yudha* mengenai Gerakan 30 September (G30S) dan perannya dalam melawan propaganda komunis di Indonesia. *Berita Yudha*, surat kabar yang berafiliasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), berperan sebagai penghubung antara TNI-AD dan masyarakat, menumbuhkan ketahanan terhadap ideologi komunis. Pendirian surat kabar ini sebagai saingan media komunis berawal dari keterlibatan mantan karyawan *Berita Indonesia*, anggota aliansi Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS), dalam pendiriannya. Karena sikap anti-komunisnya, *Berita Indonesia* dibubarkan, dan media-media yang berafiliasi dengannya dibredel. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini mencakup empat tahap: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber primer yang digunakan adalah surat kabar *Berita Yudha* dan *Harian Rakjat*, dilengkapi dengan buku-buku, majalah, dan artikel jurnal penelitian online dan offline. Penelitian ini mengungkap efektivitas *Berita Yudha* dalam melawan propaganda komunis, dengan memanfaatkan

---

posisinya yang unik sebagai satu-satunya surat kabar yang diizinkan terbit setelah peristiwa G30S dan pemberitaan propaganda *Harian Rakjat*. Pelaporan faktual *Berita Yudha* tentang peristiwa G30S melawan narasi menyimpang *Harian Rakjat*, mengungkap peran PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan pemanfaatan strategis *Berita Yudha* atas posisinya yang istimewa sebagai salah satu dari dua surat kabar yang diizinkan untuk melaporkan peristiwa G30S secara faktual, mengungkap keterlibatan PKI. Penelitian ini menyoroti sikap anti-komunis BPS dan peran media yang berafiliasi dengan TNI-AD dalam menyikapi G30S.

---

## PENDAHULUAN

Saat ini, media massa dan pers dapat diakses dengan mudah melalui gawai yang kita miliki. Setiap informasi, baik benar maupun salah, dapat tersebar dengan cepat. Secara retrospektif, persebaran berita dan informasi di Indonesia pada masa lampau merupakan hal yang berbeda. Akses terhadap informasi umumnya hanya bisa diperoleh melalui siaran radio, terbitan surat kabar, dan tayangan televisi. Meskipun demikian, persebaran informasi melalui televisi masih cukup jarang karena sampai tahun 1985 akses televisi secara umum baru berada di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Medan, Balikpapan, Palembang, Surabaya, Denpasar, dan Manado (Irianto, 2014: 29).

Media massa memiliki peranan penting pada setiap peristiwa sejarah karena dalam penyajian beritanya selalu menampilkan informasi dan pembingkaiannya untuk membentuk perspektif tertentu. Pembingkaiannya (*framing*) dalam media adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Media massa dapat mengemas retorika suatu peristiwa yang memengaruhi persepsi masyarakat agar memiliki interpretasi tertentu terhadap suatu peristiwa. Pada 1987, William Anthony Gamson dan Andre Modigliani (1987: 143) menyatakan bahwa *framing* media massa utamanya mencakup argumen, informasi, simbol, metafora, dan gambar. Dalam

menyampaikan *framing*, media massa melakukannya dengan menulis gagasan pokok atau alur cerita yang memberikan makna pada rangkaian peristiwa yang ditulis di dalam berita.

Di Indonesia, kebebasan pers sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 versi sudah diamendemen, yakni pada Pasal 28 E Ayat (2) dan (3), serta pada Pasal 28 F. Penerapan dari Pasal 28 UUD 1945 dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, pers sebagai media massa mencakup media fisik (dicetak, misalnya surat kabar, majalah, dan sebagainya), media elektronik (menggunakan gawai, misalnya portal berita daring, televisi, radio, dan sebagainya), serta media dalam bentuk lainnya selama media tersebut adalah wadah mengemukakan pikiran, baik secara lisan, tulisan, maupun keduanya. Oleh karena itu, di atas kertas, Indonesia sudah mengakui dan menjamin kebebasan mengemukakan pendapat dan berpikir. Jaminan kebebasan pers adalah kiat dalam mewujudkan negara demokratis dan berlandaskan hukum (Ariyanti, 2010: 2).

Setelah Indonesia merdeka, pers berperan dalam memaparkan pemberitaan yang menonjolkan perspektif tertentu—tergantung dari pihak yang membina badan pers atau bahkan diwakilkan secara langsung oleh badan pers tersebut. Hal ini terjadi karena pers adalah

bagian dari institusi sosial yang penting dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat dan pemerintah. Bahkan, lembaga pers sering dianggap sebagai kekuatan demokrasi keempat dalam sebuah negara—selain dari lembaga-lembaga formal, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif (Kumar & Singh, 2019: 370).

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), yang sering disebut juga sebagai masa Demokrasi Liberal, pers menikmati masa-masa yang cenderung bebas serta tidak memiliki persyaratan penerbitan yang rumit—dalam beberapa kasus, usaha penerbitan pers justru dibantu serta disubsidi modalnya oleh pemerintah (Sjahril & Sjureich, 1971: 127). Sebagai negara yang baru merdeka, menggerakkan masyarakat melalui media dianggap penting, terutama dalam membentuk identitas bangsa. Pemerintahan Soekarno di masa ini berupaya membantu penerbitan pers bumiputra karena media massa milik Belanda dan Tionghoa masih mendominasi, serta membawa suara dan orientasi politiknya masing-masing (Suwirta, 2008: 263).

Salah satu ciri khas politik Indonesia pada masa Soekarno memimpin ditandai dengan munculnya berbagai macam poros politik bersama ideologinya masing-masing. Situasi ini ditandai oleh Keputusan Menteri Penerangan saat itu, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Achmadi Hadisoemarto, pada Maret 1965, yang mewajibkan surat kabar di Indonesia memiliki afiliasi dengan partai politik, kelompok fungsional, atau organisasi massa (Sen & Hill, 2001: 63). Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Penerangan Nomor

29/SK/M/65 tentang Ketentuan Pokok Badan Usaha Pers dalam rangka meningkatkan pers Indonesia. Inti dari Ketentuan Pokok Badan Usaha Pers ini mewajibkan surat kabar maupun terbitan periodik agar memiliki keterkaitan dengan partai politik, golongan karya, atau organisasi massa. Selain itu, staf redaksi media dan staf manajemen tata usaha juga harus diutamakan dari pilihan partai atau entitas politik (Hill, 2011<sup>a</sup>: 26).

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan keterikatan media dengan poros politik mengakibatkan kemunculan pelbagai media berafiliasi poros politik yang membawa motif masing-masing. Terdapat berbagai partai politik yang berideologi non-agama (ideologi nasionalis, sosialis, dan komunis) maupun agama (agama Islam, Kristen, dan Katolik). Tentunya, di masa kepemimpinan Soekarno, baik pada Demokrasi Parlementer (1950–1959) maupun Demokrasi Terpimpin (1959–1965) ideologi selain nasionalis (misalnya komunis dan sosialis) belum dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari kebebasan mendirikan partai dengan bermacam ideologi ini, jumlah partai politik di Indonesia juga tidak dapat dibatasi, seolah-olah menunjukkan partai politik sebagai penunjang kedaulatan tertinggi dalam negara (Umar & Musavi, 2020: 8). Situasi seperti ini juga merambat pada dunia pers, dengan kemunculan surat kabar-surat kabar perwakilan golongan agama, komunis, nasionalis, dan lain-lain. Sebagai contoh, di tahun 1950-an sudah terdapat media dengan afiliasi politiknya masing-masing, seperti *Suluh Indonesia* sebagai afiliasi Partai Nasional Indonesia (PNI), *Abadi*

sebagai afiliasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), *Duta Masyarakat* sebagai afiliasi Nahdlatul Ulama (NU), serta *Harian Rakjat* dan *Warta Bhakti* sebagai afiliasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

*Berita Yudha*, bersamaan dengan *Angkatan Bersendjata*, hadir sebagai media afiliasi TNI-AD sejak 1965. Perlu diketahui bahwa TNI sejatinya sudah memiliki keterlibatan terhadap dunia pers setidaknya sebelum *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* muncul di tahun 60-an. Rekam jejak paling awal dapat dilihat pada September 1945, ketika bagian Pers dan Informasi cabang intelijen militer, yang dikenal sebagai Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani), di bawah Kolonel Zulkifli Lubis, mendirikan surat kabar *Berita Indonesia*. Adapun redaksi dari surat kabar ini dipimpin oleh Suardi Tasrif. Sebagian besar dari pegawai yang bekerja di *Berita Indonesia* pada perkembangannya pindah ke *Indonesia Raya*, salah satu yang paling dikenal adalah Hasjim Mahdan sebagai pemimpin umum *Indonesia Raya* (Hill, 2010: 36).

Surat kabar *Indonesia Raya* pada masa awal pembentukannya sangat banyak dipengaruhi oleh hegemoni TNI-AD mengingat pendirian surat kabar ini disokong oleh elite TNI, seperti Gubernur Militer Daan Jahja dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Keterlibatan TNI-AD terhadap *Indonesia Raya* pudar karena adanya perpecahan internal oleh Hasjim Mahdan dan Mochtar Lubis, yang diperparah dengan reputasi editorial yang semakin terpuruk akibat pemberitaan *Indonesia Raya* yang memuat surat pembelaan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Zulkifli Lubis yang pada saat itu dituding hendak melakukan kudeta (Zara & Yuliantri, 2007: 662–664). Pada

perkembangannya, *Berita Indonesia* juga tidak bernasib lebih baik ketimbang *Indonesia Raya*. Hal ini disebabkan *Berita Indonesia* dibredel oleh rezim Orde Lama akibat keterlibatannya dengan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Menurunnya pamor *Indonesia Raya* yang oplahnya menurun drastis sejak penghujung 1958, serta dibredelnya *Berita Indonesia* pada Desember 1964, membuat TNI tidak benar-benar memiliki media yang dapat mewakili suara mereka. Oleh karena itu, *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* kemudian muncul pada 1965 dalam rangka mengisi pos yang sedang kosong tersebut.

Awal mula *Berita Yudha* hadir, sejak 9 Februari 1965, pada pola pemberitaannya, merupakan media penghubung TNI ke masyarakat. Pemberitaan-pemberitaan yang disajikan oleh *Berita Yudha* tidak lebih dari berita seputar TNI, politik Indonesia dan dunia, serba-serbi Soekarno yang sedang mengampanyekan “ganyang Malaysia”, dan propaganda Orde Lama berupa Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol USDEK)—meski terdapat juga rubrik-rubrik lain, seperti olahraga dan hiburan. Di awal pendirian dan penerbitannya, *Berita Yudha* tidak benar-benar menunjukkan sikap berseberangnya dengan PKI, apalagi *Harian Rakjat*. *Berita Yudha* justru berada dalam satu koridor yang sama dengan *Harian Rakjat* dalam mendukung politik Soekarno, yaitu Manipol USDEK, Nasakom, dan konfrontasi dengan Malaysia, setidaknya sampai sebelum Gerakan 30 September 1965 yang membunuh perwira-perwira TNI-AD.

Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang diinisiasi oleh PKI merupakan titik balik dalam sejarah Indonesia modern yang membuka gerbang periode Orde Baru Suharto. TNI-AD, yang bersitegang dengan PKI, menggunakan momentum melalui dua surat kabarnya, yaitu *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*, dalam membingkai peristiwa G30S dengan menunjuk siapa dalang peristiwanya, yaitu PKI. Pembatasan penerbitan surat kabar pada 3 Oktober yang berlaku setelah terjadinya G30S menyisakan media yang berafiliasi militer saja yang diperbolehkan untuk terbit dengan bebas. Hal ini terjadi karena *Harian Rakjat* pada 2 Oktober 1965 nekat menerbitkan surat kabar dan mewartakan peristiwa G30S dengan *framing* pembunuhan terhadap dewan jenderal TNI-AD dilakukan untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia. Hal ini juga sebenarnya diikuti oleh beberapa surat kabar yang juga memberitakan G30S dengan *framing* yang selaras dengan *Harian Rakjat*, seperti *Suluh Indonesia* dan *Warta Bhakti*. Hal ini tentunya dibalas oleh *Berita Yudha* (dan di saat yang bersamaan juga oleh *Angkatan Bersendjata*) dengan menerbitkan pemberitaan pada 4 Oktober 1965 dengan fokus pembingkai/*framing* bahwa G30S adalah gerakan kontrarevolusi yang membunuh perwira TNI-AD sebagai figur pertahanan nasional.

*Framing* yang dilakukan oleh *Berita Yudha* dilakukan secara masif dan konsisten untuk membendung propaganda komunis, yang kemudian situasinya semakin menguntungkan *Berita Yudha* dalam melancarkan propaganda balasannya. Sebab, pada 6 Oktober 1965 seluruh surat kabar yang membela dan

membenarkan G30S dilarang terbit serta diproses hukum. Suharto yang memiliki latar belakang TNI-AD juga menggantikan Soekarno pada 1966 setelah diberlakukannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), sehingga *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* justru memperoleh posisi yang vital dalam menjalankan tugas sebagai corong suara TNI dan Golkar—dalam bentuk media dan pers (Paget, 1967b: 214). *Berita Yudha* kemudian menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menciptakan citra pembangunan dari rezim Orde Baru. Hal ini terjadi sebagai pemenuhan idealisme pemerintahan Orde Baru, yang percaya bahwa pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang kuat, serta mampu tampil dominan dalam usaha-usaha untuk membangun bangsa dan negara (Silalahi, 1990: 12). Adapun pada aspek G30S rezim Suharto berupaya untuk menampilkan bahwa G30S adalah upaya kup PKI karena pada saat itu Soekarno digambarkan sedang sakit dan memungkinkan untuk dikudeta. Salah satu upayanya adalah melalui pembuatan film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI. Selama rezim Orde Baru berkuasa, film ini menjadi wajib ditayangkan setiap tanggal 30 September di sekolah-sekolah (Taomo, 2016: 2)—sehingga memungkinkan untuk menanamkan perspektif kepada rakyat Indonesia sedini mungkin terhadap G30S dan PKI.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, artikel ini berfokus untuk mengkaji bagaimana *Berita Yudha*, sebagai surat kabar afiliasi TNI-AD, dapat memainkan perannya pada sekitar peristiwa Gerakan 30 September 1965. Selain itu, pembahasan di dalam artikel ini

juga akan menelaah bagaimana doktrin Nasakom dan Manipol USDEK dalam politik Demokrasi Terpimpin dapat memengaruhi iklim pers rezim Soekarno selama masa Demokrasi Terpimpin, bagaimana persetujuan Badan Pendukung Sukarnoisme dengan Partai Komunis Indonesia dan media afiliasinya dapat menyebabkan pendirian *Berita Yudha*, dan bagaimana upaya pemberitaan *Berita Yudha* dalam membendung pemberitaan *Harian Rakjat* pada peristiwa Gerakan 30 September 1965.

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Martha Howell dan Walter Prevenier, penelitian sejarah harus dilakukan dengan memilih sumber-sumber terpercaya yang dapat diandalkan, membaca secara menyeluruh, dan menyatukan sumber-sumber tersebut melalui narasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Howell & Prevenier, 2001: 2). Dalam menjalankan penelitian sejarah, penulis mendasarkan teknik penelitian kepada metode penelitian sejarah Louis Reichenthal Gottschalk. Metode yang digunakan oleh Louis Gottschalk adalah metode melalui menguji dan menganalisis sumber-sumber peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 39). Untuk menganalisis dan menghasilkan karya ilmiah dari sumber-sumber tersebut, maka penulis melalui empat tahapan melalui metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Ismaun, 2005: 50).

Pada tahap pertama, setelah menentukan tema penelitian, yaitu heuristik, penulis mencari dan mengumpulkan data dan sumber sejarah yang terkait dengan *Berita Yudha*. Sumber-

sumber sejarah tersebut didapatkan dan dikumpulkan dari Perpustakaan Nasional RI. Di Perpustakaan Nasional, penulis menemukan sumber primer berupa mikrofilm dan surat kabar fisik (terlampir).

Pada tahap selanjutnya, penulis mengkritisi sumber yang telah diperoleh. Melalui tahapan kritik sumber, setiap datum-datum sejarah yang telah didapatkan pada tahapan heuristik dapat diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sehingga semua datum-datum yang terkumpul dapat sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi (Daliman, 2012: 64–66). Kritik sumber sejarah terbagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Penulis melakukan kritik intern mengacu pada metode yang dipaparkan Helius Sjamsuddin, dengan menganalisis kredibilitas materi yang terdapat dalam sumber-sumber yang diperoleh sehingga dapat dikatakan bahwa kritik intern adalah pengujian isi sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007: 143). Sementara itu, pada kritik ekstern, penulis menelaah asal usul sumber, identitas penulis, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan sumber yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan dari sumber yang dikumpulkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kritik ekstern dalam tahap kritik sumber, yaitu untuk menelaah karakteristik dan orisinalitas sumber (Sjamsuddin, 2007: 133–134). Selain itu, kritik juga digunakan untuk mencegah adanya bias terhadap kepentingan politik tertentu.

Tahap ketiga merupakan tahap interpretasi data, yaitu penulis memberikan interpretasi datum-datum yang telah diverifikasi melalui tahapan kritik sumber. Penulis menginterpretasi dan mencoba mereka ulang datum-datum yang telah diverifikasi, terutama datum-datum surat

kabar yang berkaitan dengan penelitian, yakni *Berita Yudha* sebagai protagonis penelitian dan *Harian Rakjat* sebagai antagonis utama dalam penelitian. Penafsiran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu bantu berupa ilmu jurnalistik, terlebih pada teori framing/pembingkaihan isu dalam pemberitaan media massa, utamanya surat kabar. Penulis menggunakan teori William Anthony Gamson dan Andre Modigliani (1987: 143) yang menyatakan bahwa framing media massa utamanya mencakup argumen, informasi, simbol, metafora, dan gambar. Dalam aspek seperti ini, *Berita Yudha* berperan aktif melakukan framing/pembingkaihan terhadap PKI dan media afiliasinya terhadap terjadinya G30S.

Setelah melalui tahap mengumpulkan dan menelaah (heuristik, kritik, dan interpretasi), tahapan terakhir yang dilakukan adalah melakukan penulisan sejarah atau historiografi. Tahapan penulisan sejarah merupakan proses merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah menjadi sebuah penulisan yang utuh berdasarkan sumber-sumber serta datum-datum yang telah dikumpulkan. Untuk penulisan sejarah, dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif-analitis yang secara kronologis dijabarkan dalam konteks kesejarahan. Penulis secara deskriptif-analisis menjelaskan posisi *Berita Yudha* dalam kancah kompetisi media corong di tahun 1960-an serta bagaimana posisi *Berita Yudha* yang berafiliasi dengan TNI-AD dalam menumpaskan propaganda PKI dalam Gerakan 30 September. Penulisan akhir dari penelitian ini selain deskriptif-analisis, juga dilakukan secara kronologis agar dapat

menjelaskan alur kesejarahan dari penelitian ini dengan jelas dan menghindari anakronisme.

Penyajian akhir dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, dan metode penelitian. Bagian kedua merupakan bagian isi yang menyajikan alur politik Orde Lama, pembentukan dan pembubaran BPS, pendirian *Berita Yudha*, serta peranan *Berita Yudha* di sekitar G30S. Adapun bagian terakhir diisi dengan penutup yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nasakom dan Manipol-USDEK: Upaya Menyatukan Tiga Kekuatan Politik Indonesia pada Rezim Orde Lama**

Sebelum terjadinya G30S, rezim Orde Lama, yang dipimpin oleh Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, pada tahun 1965 sudah memasuki tahun ketujuh dalam penerapan sistem Demokrasi Terpimpin. Sesuai namanya, Demokrasi Terpimpin merupakan pola pemerintahan yang arah langkah pemerintahannya terpusat pada komando satu orang, yaitu Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu. Demokrasi Terpimpin memiliki dasar pada ketetapan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor VIII/MPRS/1965. Isi dari Ketetapan MPR dalam menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah pemerintahan Indonesia dengan karakter sesuai dengan sila keempat Pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penerapan karakter ini dengan penerapan musyawarah

untuk mencapai kata mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner. Musyawarah ini dilakukan melalui poros ideologi Pancasila yang menggaet pemikiran-pemikiran Nasionalis, Agama, dan Komunis—disingkat Nasakom (Saidurrahman, 2018: 80). Penamaan Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan oleh Soekarno sendiri pada sidang konstituante di Bandung pada 10 November 1956 (Rakhmat, 2015: 100).

Karakteristik Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin adalah pemimpin yang sangat absolut. Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin bertindak sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperiti) sekaligus sebagai penguasa Komando Tertinggi (Koti). Soekarno juga menjadi Pemimpin Besar Revolusi (PBR) berdasarkan Ketetapan MPRS I/MPRS/1960. Posisi Soekarno sebagai PBR pada perkembangannya membuat dirinya menjadi sangat berkuasa. Bahkan, kebijakan-kebijakan Soekarno banyak yang menyimpang dari konstitusi namun masih diperbolehkan dengan dalih bahwa Indonesia masih berada dalam masa revolusi (Setyahadi, 2018: 350).

Doktrin Nasakom (lakuran dari kata nasionalis, agama, dan komunis) merupakan konsep politik yang diterapkan oleh Soekarno dalam rezim Orde Lama pimpinannya (Vickers, 2005: 146). Doktrin Nasakom adalah upaya Soekarno untuk menciptakan bentuk negara yang dapat memenuhi tuntutan tiga pihak, yaitu militer, agamawan, dan komunis. Ideologi ini pada perkembangannya, terutama di masa Demokrasi Parlementer, diterapkan dan dibudayakan hingga ke akar rumput institusi pemerintah setidaknya hingga terjadinya G30S.

Upaya Soekarno dalam menyeimbangkan tiga kekuatan politik di Indonesia ini merupakan bagian dari penerapan Ideologi Pancasila. Bagi Soekarno, doktrin Nasakom adalah perasaan dari Ideologi Pancasila yang dapat diperas kembali menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. Meskipun demikian, Soekarno menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Indonesia agar membuat interpretasi mereka masing-masing terhadap doktrin Nasakom. Adapun Soekarno hanya menyatakan bahwa dirinya, sebagai Presiden Republik Indonesia, merupakan perasaan dari doktrin Nasakom, tanpa benar-benar memberikan pernyataan yang jelas terhadap keterkaitan Nasakom dengan dirinya sendiri (Soerojo, 1988: 108).

Selain Nasakom, Soekarno juga mengupayakan untuk melakukan stabilisasi politik melalui penerapan Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol USDEK). Soekarno menggunakan Manipol USDEK sebagai alat menyelaraskan lembaga-lembaga negara dan institusi sosial agar bisa seirama dengan tujuan nasional dan semangat revolusi (Ricklefs, 2008: 303). Kehadiran Manipol USDEK diindoktrinasikan kepada semua tingkat pendidikan dan pemerintahan, dan pers juga diwajibkan untuk mendukungnya. Bahkan, indoktrinasi ini dilakukan dengan koersif, karena surat kabar-surat kabar yang tidak mendukung, seperti Abadi milik Masyumi dan Pedoman milik PSI, pada perkembangannya dibredel. Dampaknya, antara tahun 1959 hingga 1961, oplah surat kabar berkurang sekitar sepertiganya, dari 1.039.000 eksemplar untuk 90 surat kabar menjadi

7.100.000 eksemplar untuk 60 surat kabar (Ricklefs, 1993: 267).

### **Konflik TNI-AD dan PKI: Katalis Keruntuhan Orde Lama**

PKI merupakan pihak yang bertentangan dengan TNI dalam pelbagai hal, utamanya dengan TNI-AD. Peristiwa Madiun Affair yakni pembentukan negara komunis di Madiun pada 1948 ketika Indonesia masih disibukkan dengan Perang Revolusi, penyerobotan tanah secara sepihak oleh PKI di kebun karet milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) IX Bandar Betsy, dan usulan Angkatan Kelima oleh PKI yang menggunakan masyarakat buruh dan petani sebagai personelnya merupakan tiga perkara yang menjadi sumber ternisbi dalam konflik antara TNI dengan PKI. Sifat PKI yang selalu agresif dalam mengupayakan idealismenya menjadi penyebab ketegangan dengan TNI, terutama TNI-AD. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap TNI-AD yang terkesan enggan menyetujui konfrontasi dengan Malaysia pada Operasi Dwikora, ketimbang PKI yang sangat mendukung konfrontasi (Crouch, 2007: 62).

Sikap kooperatif PKI terhadap kebijakan Soekarno di akhir rezim Orde Lama membuat mereka mendapatkan banyak privilese, terutama dalam politik dan pers. Hal ini juga didukung oleh penancangan Nasakom dan Manipol USDEK yang merangkul PKI. Upaya rezim Orde Lama dalam menerapkan doktrin Nasakom juga merambah pada TNI yang menjadi pionir pertahanan negara. Penerapan Nasakom terhadap TNI tidak serta-merta disambut dengan positif oleh pihak TNI. Hal ini

dapat dilihat dari sikap pihak TNI yang tidak menyetujui dimasukkannya anggota PKI ke dalam kabinet dan menjadi menteri, meskipun PNI dan NU sudah masuk ke dalam parlemen dan hanya menyisakan PKI saja yang belum memiliki perwakilan di kabinet (Ricklefs, 2008: 304–306).

Perseteraan antara TNI dan PKI sejatinya juga merambah pada konsep Demokrasi Terpimpin—sebagai katalis keberpihakan Soekarno kepada PKI daripada TNI selain karena Operasi Dwikora. Pertentangan TNI kepada Soekarno terletak pada konsep Demokrasi Terpimpin. Bagi Soekarno, Demokrasi Terpimpin adalah suatu konsep kepemimpinan negara yang dipimpin oleh satu pimpinan, yaitu Presiden Soekarno sendiri. Pendapat Soekarno ini dipandang secara berseberangan oleh pimpinan TNI-AD. Para pimpinan TNI-AD berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah konsep negara yang cenderung dipimpin secara absolut oleh satu orang semata, melainkan harus dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perbedaan pendapat Soekarno dan TNI dalam interpretasi Demokrasi Terpimpin ini pada perkembangannya terus terjadi dan menjadi katalis permasalahan selama masa Demokrasi Terpimpin (Sjamsuddin, 1988: 24).

### **Pers Orde Lama dan Konflik BPS-PKI**

Situasi media massa di Indonesia pada di masa rezim Soekarno tergolong memiliki kebebasan selama tidak melawan rezim. Hal ini bisa dibuktikan ketika melihat banyaknya media dengan ideologi-ideologi seperti komunis dan sosialis beredar yang sudah dilarang saat ini.

Hal seperti ini terjadi karena di awal rezim Soekarno, keberadaan pers memang sangat diperlukan untuk menyebarkan kabar bahwa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari penjajahan yang sekaligus memberikan pijakan legitimasi terhadap kemerdekaan Indonesia itu sendiri (Juwito, 2008: 18).

Bagi rezim Soekarno, pers merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Demokrasi dalam rezim Soekarno juga mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul, yang seluruhnya perlu dilakukan dalam dunia pers (Efendi, 2010: 29)—meski pada realitasnya banyak pengekangan terhadap kritik yang tertuju kepada rezim. Selain itu, pers di rezim Soekarno pada Demokrasi Terpimpin disesuaikan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk melaksanakan pers sesuai dengan Manipol USDEK (akronim dari Manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Posisi Manipol USDEK sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) cetusan Soekarno ini otomatis menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pengatur kebebasan pers untuk mewujudkan pembangunan berencana (Efendi, 2010: 19).

Kebebasan yang didapat tentu memiliki tapal batas, terutama dalam rangka melaraskan tujuan sesuai dengan Nasakom dan Manipol USDEK. Adanya batasan-batasan terhadap apa saja yang bisa diungkapkan ke khalayak semakin terasa di akhir 1950-an. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan No. PKM/001/0/1956 yang terbit pada 14 September 1956 oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Peraturan ini pada

intinya berupa larangan bagi media yang beredar di Indonesia untuk menyebarkan maupun memiliki media yang dinilai mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, klise, atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Triwardani, 2010: 193).

Peraturan tersebut pada perkembangannya dicabut pada 1957. Meskipun demikian, sempat diterapkannya Peraturan No. PKM/001/0/1956 merupakan simbol dari banyaknya pembatasan dan penumpasan bagi media yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta pada 1957 memberi jalan bagi pembatasan dan sensor media di Indonesia dengan dasar diberlakukannya darurat nasional *atau Staat van Oorlog en Beleg* (SOB). Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 10/1960 mengenai izin terbit surat kabar harian dan majalah dengan inti aturan yaitu perlunya izin dan persetujuan dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerah agar bisa terbit (Peperti No.10/1960). Peperti tersebut ditambah lagi dengan Penetapan Presiden (Penpres) No.6/1963 yang berisi bimbingan kepada pers di Indonesia agar tetap menjadi alat penggerak massa dalam rangka mencapai tujuan revolusioner (Penpres No.6/1963).

Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) merupakan organisasi yang didirikan untuk menandingi pengaruh komunis di Indonesia yang sudah dirasa menyimpang dan berlebihan. Pendirian BPS tidak dapat dipisahkan dari pendapat Mohamad Ibnu Sayuti (lebih dikenal sebagai Sayuti Melik) tentang Marhaenisme.

Sayuti Melik berpendapat bahwa Marhaenisme di Indonesia bukanlah Marxisme yang identik terhadap ideologi komunis. Lebih lanjut, Sayuti Melik berpendapat bahwa Marhaenisme di Indonesia adalah ideologi Marxisme yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia dengan landasan sangkan paraning dumadi (awal dan akhir dari adanya penciptaan alam semesta). Ketika Marxisme merupakan sangkan paraning dumadi yang berkembang pada masyarakat Eropa pada pertengahan abad ke-19 maka Marhaenisme adalah sangkan paraning dumadi masyarakat Indonesia abad ke-20 dasawarsa ketiga (Juti, 1964: 53).

Konflik antara BPS dengan PKI merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan mengingat tujuan dari BPS dibentuk adalah untuk mencegah PKI semakin merasuki sanubari pemerintahan Indonesia. Kritik pihak komunis terhadap adanya BPS bukan tanpa alasan. Mereka menganggap bahwa keberadaan BPS ini hanyalah upaya untuk memelintir ajaran Soekarno dengan membelokkan pernyataan-pernyataan tertentu. Lukman Njoto dalam buku *BPS Aksi Reaksi* yang mengutip *Harian Rakjat* edisi 20 November 1964 menyatakan bahwa Sayuti Melik telah membelokkan ajaran-ajaran Soekarno, yaitu filsafat pemikiran, tahap-tahap revolusi, dan doktrin Nasakom (Njoto, 1965: 12).

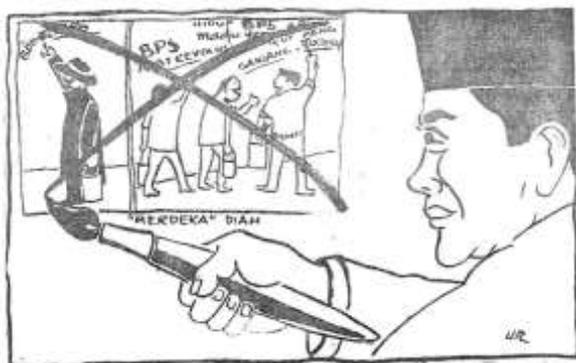
Apabila ditarik kembali pada 1963, dapat dikatakan bahwa Konferensi Wartawan Asia-Afrika (KWAA) pada 23–30 April 1963 merupakan simbol dari masifnya pengaruh PKI dalam aspek jurnalisme Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari KWAA yang menyatakan bahwa, “wartawan Asia-Afrika mendedikasikan diri mereka untuk berjuang melawan

kolonialisme-imperialisme.” Situasi ini kemudian menimbulkan perdebatan dan perselisihan di kalangan wartawan, bahkan di dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sendiri (Saputra & Kurniawan, 2023: 96).

Sebagian dari para wartawan menganggap bahwa hasil KWAA adalah penekanan kedekatan PKI dan Soekarno, dan mereka juga menganggap bahwa pihak-pihak dalam kalangan wartawan di Indonesia yang mendukung KWAA merupakan pihak yang telah disusupi oleh kader PKI. Salah satu tokoh yang paling menentang jurnalisme komunis di Indonesia pada saat itu—sekaligus sebagai pemantik berdirinya BPS—adalah Sayuti Melik. Tulisannya yang berjudul, “Pembinaan Jiwa Marhaenism” pada surat kabar *Suluh Indonesia* berisi bagaimana seharusnya Marhaenisme dapat memiliki identitas sendiri yang berbeda dari Marxisme dan Maoisme dari ideologi komunis Rusia dan Tiongkok. Artikelnya mendapatkan pujian dan diunggah ulang ke pelbagai surat kabar, yaitu *Merdeka* dan *Berita Indonesia* dalam judul “Beladjar Memahami Soekarnoisme.” Ada juga beberapa surat kabar yang antikomunis juga mendukung tulisan Sajuti. Beberapa surat kabar yang menyatakan dukungan, di antaranya adalah *Berita Republik*, *Garuda*, *Indonesian Observer*, *Mingguan Merdeka*, *Revolusioner*, *Warta Berita*, *Karyawan*, *Majalah Udajana*, *Duta Masyarakat*, *Sinar Harapan*, *Suara Merdeka*, *Tempo*, *Sinar Indonesia*, *Pikiran Rakjat*, *Suara Rakjat*, *Patriot*, *Mimbar Umum*, dan *Aman Makmur*. Tidak hanya surat kabar, wartawan-wartawan kantor berita Antara, RRI, serta TVRI juga menyatakan

bersedia menerbitkan dan menyebarkan artikel Sayuti Melik (Nurmansyah, 2017: 61).

Situasi seperti ini menjadikan media di Indonesia terbelah menjadi prokomunis pimpinan *Harian Rakjat* dan antikomunis pimpinan *Merdeka* dan *Berita Indonesia*. Pada perkembangannya, pihak media antikomunis kalah sebagai imbas dari imbauan untuk menghentikan polemik media atas permintaan Kejaksaan Agung pada 7 Juni 1964 dan Instruksi Presiden No. 010/Inst/1964 karena khawatir dapat mengganggu persatuan kekuatan-kekuatan revolusi (Smith, 1986: 203–204). Setelahnya, *Harian Rakjat* dan hegemoni komunis di Indonesia menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa bahwa komunisme di Indonesia sudah melampaui batas akhirnya, berkumpul dan membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme pada 1 September 1964 yang didukung oleh TNI-AD (Smith, 1986: 285).



**Gambar 1.** Ilustrasi Soekarno melarang BPS dan pembubaran media afiliasi BPS oleh PKI dan *Harian Rakjat*.

Sumber: *BPS, Aksi Reaksi*, hlm. 74

Eksistensi BPS tidak berlangsung lama. Keruntuhan BPS sudah terendus sejak diberlakukannya Deklarasi Bogor 12 Desember 1964 yang menekankan musyawarah terhadap perbedaan pendapat di antara pihak-pihak kekuatan revolusioner (Anwar, 1981: 483–484).

Deklarasi ini kemudian disusul oleh tuntutan dari pihak komunis untuk membubarkan BPS. Alasan mengapa PKI percaya diri bahwa BPS dapat disingkirkan karena posisi politik luar negeri Indonesia sedang terpojok. Hubungan dengan negara Blok Barat terputus sebagai imbas dimasukkannya Malaysia ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sehingga Indonesia memilih untuk keluar dari PBB. Ditambah lagi dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur. Hal tersebut membuat Soekarno mengalihkan fokus kebijaksanaannya kepada pihak PKI (Mackie, 1974: 282). Realisasi pembubaran ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Komando Operasi Tertinggi Nomor 72/KOTI/1964 tertanggal 17 Desember 1964. Klimaks dari pembubaran BPS yakni pada pelarangan terbit media yang terlibat BPS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia oleh Achmadi Hadisoemarto Nomor 17/SK/M/65 (Njoto, 1965: 74 & 101).

### **TNI dalam Pusaran Politik dan Pers pada Rezim Soekarno**

Di masa kepemimpinan Soekarno, tidak hanya sebagai perwira yang mengurus pertahanan negara, TNI juga terlibat dalam kontestasi politik. Hal ini dapat direfleksikan dalam beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia. Salah satu cerminan bahwa TNI juga aktif dalam politik dapat dilihat pada peristiwa 17 Oktober 1952. Pada peristiwa tersebut, sejumlah meriam, truk-truk tentara, dan demonstran diarahkan oleh Seksi Intel Divisi Siliwangi ke Istana Negara. Alasan perlawanan

TNI ini karena adanya campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) terhadap urusan internal TNI, terutama Angkatan Darat. Lebih lanjut, perlawanan yang dipimpin oleh Ahmad Kemal Idris ini juga menuntut agar TNI dapat ikut serta dalam politik di Indonesia melalui konsep dwifungsi (Manan, 2016: 114).

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kedudukan TNI berada di bawah komando Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang diemban oleh Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin merupakan tanda bahwa UUD 1945 kembali menjadi landasan konstitusi Indonesia yang selama ini selalu didukung oleh TNI. Dapat dikatakan bahwa penerapan kembali UUD 1945 adalah kemenangan politik bagi pihak militer. Terjadinya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) telah membuat Soekarno sadar akan stabilitas politik yang membutuhkan peran militer secara lebih signifikan—hal ini pada perkembangannya memberikan jalan bagi penerapan dwifungsi TNI (Sitompul, 2019). Adapun setelah dikumandangkannya pengembalian UUD 1945 dan pembentukan konstitusi baru (Demokrasi Terpimpin) pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution, mengeluarkan sebuah Perintah Harian yang isinya berupa imbauan agar TNI-AD dapat bekerja sama dan bersinergi dengan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Dinas Sejarah TNI-AD, 1972: 396).

TNI-AD berupaya mendapatkan pengaruh yang kuat dalam pemerintahan Indonesia. Upaya yang dilakukan TNI-AD dapat diibaratkan seperti hegemoni budaya yang digagas oleh

Antonio Gramsci. Hegemoni budaya (*cultural hegemony*) yang dimaksud adalah upaya menguasai masyarakat yang sangat beragam, seperti Indonesia, dengan memanipulasi budaya masyarakat itu dalam aspek pemahaman terhadap sebuah isu, persepsi, nilai, dan kebiasaan/adat istiadat (Bullock & Trombley, 2000: 387–388)—sehingga pandangan yang diharapkan TNI-AD ada pada masyarakat Indonesia dapat diterima dan diyakini pula oleh masyarakat Indonesia secara normatif. Penerapan dari upaya membangun hegemoni ini dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya: membentuk kelompok fungsional politik yang dinamai Golongan Karya (Golkar), mendirikan serikat buruh sebagai kompetitor serikat buruh PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yang dinamai Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), serta membentuk dua surat kabar sekaligus: *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*. Upaya-upaya tersebut juga didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Keadaan Darurat Perang 1957 sebagai jawaban atas adanya pergerakan dari Permesta dan PRRI (Roosa, 2008: 261).

Dalam aspek pers, sebelum memasuki Demokrasi Terpimpin, TNI sudah memiliki rekam jejak afiliasi media sebelum adanya *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*. Afiliasi tersebut bisa dilihat pada *Berita Indonesia dan Indonesia Raya*. Pada 6 September 1945, bagian Pers dan Informasi cabang intelijen militer (Badan Rahasia Negara Indonesia/Brani), di bawah Kolonel Zulkifli Lubis, mendirikan surat kabar *Berita Indonesia* yang dianggap sebagai surat kabar nasional pertama yang berdiri

setelah merdeka. *Berita Indonesia* memiliki keterkaitan secara formal melalui Pers dan Penerangan Brani, ketimbang *Indonesia Raya* yang hanya mendapatkan sponsor pendanaan dari beberapa perwira TNI-AD seperti Mayor Bachtar Lubis, Mayor Brentel Susilo, dan Letnan Kolonel Siswondo Parman (Lubis, 1992: 149).

Di awal pembentukannya, surat kabar *Indonesia Raya* merupakan surat kabar yang memiliki afiliasi dengan ABRI. Meskipun demikian, afiliasi tersebut tidak terbentuk secara resmi. Pihak militer membantu surat kabar *Indonesia Raya* sebatas pada bantuan moral, membayar ongkos cetak, dan gaji pegawai jika diperlukan (Atmakusumah, 1980: 185–186). Meskipun demikian, surat kabar ini tetap saja dianggap sebagai surat kabarnya tentara. Anggapan seperti ini juga diperkuat dengan penjelasan pengamat Indonesia Herbert Feith yang menyatakan bahwa surat *kabar Indonesia Raya* sering dianggap sebagai koran komando tentara yang disokong oleh tentara hingga tahun 1958 (Hill, 2011b: 50).

Hegemoni komunis yang sangat masif pada awal 1960-an membuat TNI-AD kewalahan dalam mengimbangi, terutama dalam pers. Situasi menjadi semakin buruk ketika BPS yang dibentuk untuk menghalau pengaruh komunis semakin memengaruhi Indonesia dan Soekarno tampak sia-sia karena BPS dibubarkan paksa dan media afiliasinya dibredel, termasuk *Berita Indonesia* yang menjadi afiliasi TNI-AD. Sepeninggal *Berita Indonesia* dan *Indonesia Raya*, signifikansi peranan TNI pada industri media massa di Indonesia kembali mencuat ketika didirikannya *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* pada awal 1965.

### **Pembentukan Berita Yudha: Harapan Baru setelah Pembubaran BPS**

Berdirinya *Berita Yudha* tidak dapat dipisahkan dengan *Berita Indonesia* dan Badan Pendukung Sukarnoisme yang dibubarkan. Sebelum pembredelan pers, Badan Pendukung Sukarnoisme telah lebih dulu dilarang keberadaannya melalui Surat Keputusan Nomor 72/KOTI/1964 tanggal 17 Desember 1964 (Njoto, 1965: 73–74). Pada awal 1965, BPS sudah memasuki situasi ujung tanduk. Puncaknya, pada 23 Februari 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk membredel seluruh pers yang masuk ke dalam aliansi BPS. Selang satu bulan kemudian, pada 25 Maret 1965, melalui Departemen Penerangan, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa semua surat kabar wajib berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa tertentu (Harisman, Mulyadi, dan Nugrahanto, 2020: 105).



**Gambar 2.** Logo surat kabar *Berita Yudha* dengan slogan “untuk mempertinggi ketahanan revolusi Indonesia.”

Sumber: *Berita Yudha* 8 Mei 1965

*Berita Yudha* merupakan surat kabar yang didukung oleh TNI, khususnya TNI-AD. Slogan yang dimiliki *Berita Yudha*, “untuk mempertinggi ketahanan Revolusi Indonesia,” sesuai dengan situasi pada masanya yakni diwajibkannya indoktrinasi *Dibawah Bendera Revolusi* bagian satu sebagai bagian dari indoktrinasi Nasakom di Indonesia melalui surat kabar yang beredar saat itu (*de Volksrant*, 4 Maret 1965: 11). Surat

kabar *Berita Yudha* hadir pertama kali pada 9 Februari 1965 oleh J.K.K. Yudha Press setelah dibredelnya surat kabar *Berita Indonesia* dan beberapa media yang ada di bawah Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Operasional media berada di bawah kendali Penanggung Jawab, yakni Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Ibnu Subroto (Pengurus Pusat PWI, 1985: 66). Selain surat kabar utama yang terbit setiap hari Senin sampai Sabtu, varian lain surat kabar *Berita Yudha* adalah *Berita Yudha Minggu* yang terbit setiap hari minggu, *Berita Yudha Sport & Film* sebagai surat kabar mingguan yang berfokus memberitakan olahraga dan hiburan, serta *Madjalah Moderna* sebagai majalah terbit tiap Sabtu yang menyoroti budaya populer dan isu umum di masyarakat. Dua fungsi utama *Berita Yudha* adalah: 1) bertindak sebagai alat penghubung antara ABRI secara umum dan TNI-AD secara khusus; dan 2) bertindak sebagai alat untuk mempertinggi ketahanan perjuangan Indonesia (Hamidy, 1976: 314).

*Berita Yudha* mengantongi izin penerbitan melalui Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 0055/U/SK/DPHM/SIT/65 tanggal 10 Agustus 1965. *Berita Yudha* juga merupakan anggota Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) dan memiliki Surat Izin Pembagian Kertas (SIPK) No. 5633/AC/B-7/I. *Berita Yudha* terbit setiap hari dengan percetakan surat kabar dikerjakan oleh PT Kinta. Di awal pendiriannya, kantor redaksi dan tata usaha *Berita Yudha* masing-masing berada di Jalan Lapangan Benteng Barat Nomor 32 dan Jalan Kemakmuran Nomor 31, Jakarta. Adapun pada perkembangannya, yaitu pada

1971, *Berita Yudha* beralih menjadi *Berita Buana*, tetapi *Berita Yudha* terus melanjutkan risalah wartanya walaupun dengan pengasuh lain, yakni Yayasan Parikesit (Junaedhi, 1991: 26).

Lebih lanjut, surat kabar *Berita Yudha*, bersamaan dengan surat kabar *Angkatan Bersendjata*, menjadi kompetitor langsung dari media binaan PKI, terutama melalui artikel-artikel oleh Wiratmo Soekito yang dikenal gemar memojokkan golongan komunis di Indonesia (Paget, 1967b: 214). Perbedaan antara *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* terletak pada pola kepemilikan. *Berita Yudha* secara langsung ada di bawah kendali Kepala Penerangan Umum Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Ibnu Subroto, sedangkan *Angkatan Bersendjata* berada di bawah pimpinan Kepala Pusat Penerangan *Angkatan Bersenjata* Republik Indonesia Brigadir Jenderal Raden Harya Sugandhi Kartosubroto (Mohamad, 1984: 365). Selain itu, editorial dari *Berita Yudha* digambarkan “tidak sefleksibel” *Angkatan Bersendjata* oleh Roger K. Paget (Paget, 1967<sup>b</sup>: 217).

Sejatinya *Berita Yudha* tidak hanya di Jakarta saja, melainkan juga terbit di beberapa tempat lain. Roger K. Paget menjabarkan beberapa *Berita Yudha* yang terbit di beberapa tempat berbeda, yaitu (Paget, 1967<sup>a</sup>: 178):

- 1) *Berita Yudha* edisi Jawa Barat. Surat kabar ini terbit pertama kali di Bandung pada 6 Agustus 1966. Penerbitan surat kabar dikelola oleh Jajasan Harapan Rakjat yang juga menerbitkan surat kabar *Harapan Rakjat*;

- 2) *Berita Yudha* edisi Jawa Timur. Surat kabar ini terbit pertama kali di Surabaya pada 1 Desember 1965. Penerbitan surat kabar dikelola oleh Tjahaja Muda. Selain *Berita Yudha*, Tjahaja Muda juga memiliki varian surat kabar lain, yaitu *Manifesto* yang terbit pada 14 Januari 1966;
- 3) *Berita Yudha* edisi pusat. Surat kabar ini merupakan surat kabar pusat dari *Berita Yudha* yang pertama kali terbit pada 9 Februari 1965. Memiliki varian *Berita Yudha Minggu* dan *Berita Yudha Sport & Film*. Penerbitan surat kabar dikelola oleh JKK Berita Yudha Press;
- 4) *Berita Yudha* edisi Sumatra. Surat kabar ini terbit pertama kali di Medan pada 11 Mei 1966. Penerbitan surat kabar ini dikelola oleh Jajasan Takari.

Pembentukan *Berita Yudha* tidak dapat dilepaskan dari pembredelan Berita Indonesia. Hal ini dikomentari pula oleh surat kabar Belanda, *de Volksrant* (4 Maret 1965: 11) yang memberitakan pembentukan *Berita Yudha* di bawah perlindungan TNI:

*Met de pers is het steeds verdrietiger gesteld. Je zult hebben gelezen van de sluiting van dagbladen. Een van de meest vooraanstaande dagbladen is Merdeka, dat nota bene vanaf het begin de Indonesische revolutie steunde onder leiding van hoofdredacteur B. M. Diah, die dooide journalistenvereniging werd uitgestoten als gevolg van het regeringsverbod. Ben ander gezaghebbend blad de "Berita Indonesia" kreeg onlangs een andere naam, "Berita Yudha" en werd in bescherming genomen door het leger. Of het helpt moeten we afwachten, want alles wat niet de officiële paleispolitiek of de communistische lijn volgt is onderhevig aan felle kritiek.*

(Pers berada dalam kondisi yang semakin menyedihkan. Anda tentu sudah membaca tentang penutupan beberapa harian. Salah satu harian yang paling

menonjol adalah *Merdeka*, yang sejak awal mendukung revolusi Indonesia di bawah kepemimpinan pemimpin redaksi B. M. Diah, yang dibubarkan asosiasi wartawannya karena larangan pemerintah. Majalah otoritatif lainnya, "*Berita Indonesia*", baru-baru ini berganti nama menjadi "*Berita Yudha*" dan berada dalam perlindungan militer. Apakah hal ini membantu masih harus dilihat, karena apa pun yang tidak mengikuti politik resmi istana atau garis komunis akan dikritik habis-habisan.)

*de Volksrant* juga menyoroti bagaimana situasi pers di Indonesia yang sudah berbulan-bulan menerbitkan tulisan-tulisan Soekarno dari bukunya *Dibawah Bendera Revolusi* bagian satu sebagai indoktrinasi Nasakom. Selain itu, pemberitaan dari *de Volksrant* ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan *Berita Yudha* akan ditunggu perkembangannya. Hal ini mengingat situasi militer Indonesia (terutama TNI-AD) yang berseberangan dengan komunis—sedangkan di satu sisi pada saat itu apa pun yang tidak mengikuti kebijakan resmi pemerintah Indonesia atau garis politik pihak komunis, akan mendapat konsekuensi yang keras dan bisa saja berujung pada pidana (seperti pembredelan-pembredelan surat kabar yang telah terjadi sebelumnya).

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pembubaran *Berita Indonesia* merupakan imbas dari pelarangan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Adapun pelarangan BPS oleh rezim Orde Lama Soekarno dilatarbelakangi oleh pembentukannya yang dibantu Amerika Serikat melalui badan intelijen mereka, *Central Intelligence Agency* (CIA) untuk mencegah Soekarno terbawa terlalu jauh ke dalam arus ideologi komunisme (Simanjuntak & bin Samsudin, 2016: 259). Pembredelan *Berita Indonesia* juga merupakan dampak dari

pembubaran BPS yang diiringi dengan provokasi dari media prokomunis Indonesia (Said & Moeljanto, 1983: 78–79).

Pembubaran dan pembredelan BPS ini tentu mengindikasikan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa 1960-an telah menjadi salah satu kekuatan politik terkuat di Indonesia. PKI di tahun 1965 sudah memiliki kekuatan politik dan kekuatan massa yang besar. Bahkan, PKI mampu menginfiltrasi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pada masanya merupakan partai tombak paham nasionalisme Indonesia yang dinakhodai oleh Soekarno (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 475). Prinsip “Marhaenisme” PNI, yang oleh pengaruh PKI berubah makna menjadi “Marxisme dengan kondisi Indonesia,” semakin memberikan sinyal bahwa Indonesia akan mencondongkan bangsanya menuju Blok Timur dengan haluan komunismenya—sesuatu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila serta politik bebas-aktif yang dianut Indonesia. Hegemoni tersebut sangat deras mengalir pada masanya karena sikap agresif PKI dalam mengatasi lawan-lawan politik mereka. Akan tetapi, masih ada satu institusi milik negara yang dianggap menjadi rival politik terdekat mereka dan tidak kunjung dapat disusupi oleh PKI, yaitu Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD). Dalam rangka menaklukkan poros TNI-AD, PKI menginisiasi situasi revolusi dengan dalih menghancurkan *The Old Established Forces* (Oldefo) dan Neo-Kolonialisme-Imperialisme (Nekolim) (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia, 2000: 177).

Perlu diketahui bahwa di awal pendiriannya, *Berita Yudha* tidak dapat benar-benar

menjalankan misi mereka dalam menantang *Harian Rakjat* di singgasana puncak hegemoni surat kabar Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pemberitaan-pemberitaan *Berita Yudha* yang cenderung mendukung kebijakan Soekarno pada konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Hal ini bisa dilihat pada salah satu artikel *Berita Yudha* edisi 8 Mei 1965 yang berjudul “Menteri Agama: Malaysia nodai kechusyuan Ibadah Hadji, dan keagungan Tanah Suci” (lihat gambar 3).



**Gambar 3.** Pemberitaan *Berita Yudha* edisi 8 Maret 1965 yang mengindikasikan bahwa *Berita Yudha* mendukung kiat-kiat untuk mengganyang Malaysia yang dianggap sebagai antek Nekolim.  
Sumber: *Berita Yudha* 8 Mei 1965

Bahkan, *Berita Yudha* mendukung adanya ideologi selain Pancasila dengan salah satu artikel edisi 1 Oktober 1965 yang berjudul “Bersama Buruh dan Tani para Teknisi m'bina masyarakat Sosialis” (lihat gambar 3). Dukungan yang diberikan *Berita Yudha* terhadap kebijakan Orde Lama dilakukan agar menghindari pembredelan dari rezim Orde lama. Selain itu, pemberitaan kooperatif ini dilakukan untuk menyaingi hegemoni PKI dalam rangka merebut hati masyarakat Indonesia.



**Gambar 4.** Pemberitaan *Berita Yudha* edisi 1 Oktober 1965 yang mendukung adanya pembinaan masyarakat buruh dan petani berasaskan sosialisme oleh para teknisi.

Sumber: *Berita Yudha* 1 Oktober 1965

### Terjadinya Gerakan 30 September 1965 dan Propaganda Harian Rakjat

Gerakan 30 September 1965 (G30S) merupakan peristiwa berlatarbelakang kudeta/kup terhadap institusi pemerintahan yang sah di Indonesia pada masanya. Adapun institusi pemerintahan sah yang dimaksud tersebut adalah TNI-AD. Peristiwa G30S dieksekusi oleh Resimen Tjakrabirawa pimpinan Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang merupakan loyalis PKI. Operasi ini menargetkan penculikan sebanyak tujuh pimpinan TNI-AD. Adapun tiga dari tujuh korban yang sejatinya ditargetkan oleh G30S—yaitu Menteri/Panglima TNI Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono dan Brigadir Jenderal Donald Isaac Pandjaitan—tewas terbunuh di rumah mereka masing-masing, sedangkan tiga orang target lainnya—yaitu Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal Sisowno Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomihardjo—berhasil ditangkap dan diculik dalam keadaan hidup. Target utama mereka, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdul Haris

Nasution, berhasil lolos dari upaya penculikan dengan melompati tembok ke taman Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia—akibatnya, ajudan pribadinya, Letnan Satu Pierre Andries Tendeau, ditangkap karena dikira Abdul Haris Nasution (Roosa, 2006: 40).

Kedekatan Soekarno dan PKI juga menjadi salah satu faktor krusial yang membuat PKI percaya diri melakukan hal ini. Bila melihat situasi politik antara Soekarno dan PKI, kedua pihak tersebut sangat dekat. Soekarno di akhir kekuasaannya memang menerapkan sistem Nasakom yang merangkul ketiga ideologi tersebut ke dalam sistem tatanan negara. Meskipun demikian, bukan berarti Soekarno menjadi tunduk ke dalam agenda PKI semata. Bukti dari tidak tunduknya Soekarno kepada PKI dapat dilihat pada komposisi Gubernur tahun 1965. Pada tahun 1965, dari 24 gubernur yang diangkat, tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan anggota PKI. Sebaliknya, justru sebanyak 12 perwira ABRI yang mengisi posisi gubernur (Tjhan, 2021: 4). Dengan situasi seperti itu, PKI mengambil langkah propaganda yang diharapkan dapat mengumpulkan kekuatan dari bawah (rakyat biasa, buruh, petani) ke atas (birokrat). Salah satu upaya mereka untuk mewujudkan agenda adalah dengan menggunakan media.

Dalam rangka mewujudkan agenda politik PKI, peranan *Harian Rakjat* diperlukan untuk memberi propaganda kepada masyarakat. *Harian Rakjat* yang memiliki slogan, “Untuk rakjat hanya ada satu harian, *Harian Rakjat!*,” ini merupakan surat kabar corong ideologi komunis yang beroperasi dari 31 Januari 1951 hingga penerbitan surat kabar terakhirnya pada 2 Oktober 1965. Gaya jurnalistik *Harian Rakjat*

bersifat lugas, konfrontatif, meledak-ledak, dan sarat kontroversi. Tidak jarang pula *Harian Rakjat* menyulut konflik dengan media serta poros politik lain di Indonesia (Yuliantri & Dahlan, 2008: 77). Editorial dari *Harian Rakjat* yang selalu mengambil sikap berani, ofensif terhadap lawan-lawannya, serta ditopang dengan gaya bahasanya yang sederhana, lincah, dan lugas—mengilhami ajaran Marxisme dan Leninisme—membuat pemberitaannya mudah dipahami oleh banyak orang dari kelas masyarakat yang berbeda, terutama petani dan buruh yang menjadi basis dukungan PKI (Zulkifli, 2014: 43).

Media yang dimiliki PKI dalam mengupayakan propaganda tidak hanya melalui *Harian Rakjat* semata, melainkan juga dengan surat kabar lain yang berafiliasi dengan *Bintang Timur*, yang merupakan surat kabar corong Partai Indonesia (Partindo), memiliki rubrik bertemakan kebudayaan bernama Lentera yang editorialnya diserahkan kepada Pramoedya Ananta Toer. Adapun Pramodeya Ananta Toer pada saat itu merupakan aktivis Lembaga Kebudayaan Rakjat (Lekra), sebuah organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI (Purwanto, 2020). Selain *Bintang Timur*, terdapat pula surat kabar *Warta Bhakti*. Pendirian *Warta Bhakti* berawal dari surat kabar mingguan Tionghoa bernama *Sin Po* (新報) pada 1910 yang kemudian beralih menjadi *Pantja Warta* pada 1958 sebelum berganti lagi menjadi *Warta Bhakti*. Sebagai media afiliasi PKI, *Warta Bhakti* menentang pers anti-PKI yang pada saat itu tergabung ke dalam BPS (Said, 2019).

*Harian Rakjat*, pada perkembangan situasi dari G30S, mencoba membenarkan tindakan pembunuhan para petinggi TNI-AD. Hal ini dapat dilihat pada halaman tajuk yang rilis pada 2 Oktober 1965. Dalam halaman tajuk tersebut, disebutkan bahwa Letnan Kolonel Untung Syamsuri menyelamatkan Presiden RI Soekarno dan kedaulatan Indonesia dari kup TNI-AD yang disokong oleh Blok Barat/Amerika Serikat (lihat gambar 5).



**Gambar 5.** Halaman tajuk *Harian Rakjat* pada 2 Oktober 1965 yang membela Gerakan 30 September 1965 dengan dalih menyelamatkan Presiden Soekarno dari upaya kup TNI-AD. Sumber: *Harian Rakjat* 2 Oktober 1965

Tidak hanya mewartakan peristiwa pembunuhan petinggi TNI-AD, *Harian Rakjat* juga menerbitkan semacam karikatur propagatif. Karikatur ini berada pada bagian paling bawah laman tajuk edisi 2 Oktober 1965. Pada karikatur tersebut, diperlihatkan bahwa Gerakan 30 September 1965 berbentuk kepalan tangan yang memukul seorang figur berseragam TNI-AD yang ditopang oleh tongkat dari seorang

figur bertopi bintang-bintang khas Amerika Serikat. Topangan dari figur itu juga disertai uang-uang bersimbol dolar Amerika Serikat (\$) yang menjadi indikasi bahwa *Harian Rakjat* menuduh TNI-AD disokong oleh Amerika Serikat dalam upaya mengkuadeta Soekarno.

Di halaman yang sama terdapat juga artikel berjudul “Perintah Harian Menteri/Panglima Angkatan Udara R.I.” (lihat gambar 5) yang berisi informasi bahwa G30S adalah upaya positif menyelamatkan kedaulatan Indonesia melalui upaya pembersihan tubuh TNI-AD. Hal ini menunjukkan bahwa TNI-AU telah seirama dengan PKI dalam menyerang lawan politiknya, yaitu, TNI-AD.



**Gambar 6.** Informasi *Harian Rakjat* berupa perintah dari pimpinan TNI-AU yang secara tidak langsung membenarkan Gerakan 30 September 1965.  
Sumber: *Harian Rakjat* 2 Oktober 1965

Terdapat dugaan bahwa *Harian Rakjat* telah lebih dulu menyiapkan cetakan 2 Oktober 1965. Hal ini diyakini oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, yang menduga bahwa TNI-AD sudah merebut kantor redaksi *Harian Rakjat* pada Jumat malam. Pihak TNI-AD sudah mencurigai keterlibatan PKI dalam G30SS karena mereka menangkap banyak orang yang berasal dari organisasi Pemuda Rakjat yang

merupakan sayap kepemudaan milik PKI. Untuk melancarkan propaganda PKI, edisi 2 Oktober 1965 sudah dicetak dan didistribusikan sebelum penyergapan TNI-AD, atau paling tidak sudah dicetak dan didistribusikan tepat sebelum TNI-AD datang menyergap dan menduduki kantor. Anderson dan McVey cenderung pada kemungkinan pertama karena edisi Sabtu *Harian Rakjat* barangkali sudah dicetak pada Jumat sore, mengingat di masa itu kebanyakan kantor hanya mempekerjakan karyawannya setengah hari pada setiap hari Jumat (Roosa, 2008: 238).

### Pemberitaan *Berita Yudha* terhadap Gerakan 30 September 1965 dan Upaya Melawan Propaganda Komunis

Peranan *Berita Yudha* menjadi lebih eksplisit dalam mengutarakan pertentangannya terhadap komunisme di Indonesia setelah terjadi G30S. Hal ini ditandai ketika Presiden Soekarno, melalui siaran radio, pada 2 Oktober 1965 mengumumkan pengangkatan Mayor Jenderal Suharto sebagai pemimpin TNI-AD sementara waktu dan kontrol pers sepenuhnya berada di tangan TNI-AD (Suwarta & Asnan, 2012: 147). Hal ini ditambah dalam skala regional Jakarta dan sekitarnya, pada 3 Oktober 1965, Umar Wirahadikusumah, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, mengeluarkan Maklumat Penguasa Perang Daerah No. 01/Drt/10/1965 yang melarang seluruh penerbitan surat kabar di Jakarta, kecuali *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha* (Hartanto, 2007: 819).

Biang dari perlawanan terhadap propaganda komunis terjadi pada 2 Oktober 1965. Sebab, *Harian Rakjat* merilis surat kabar dengan mencantumkan sebuah karikatur yang

menunjukkan bahwa pemberontakan PKI terjadi untuk menyelamatkan presiden dan Indonesia dari kudeta Dewan Jenderal TNI-AD. Pemberitaan PKI ini kemudian dibalas oleh *Berita Yudha* dengan menunjukkan bahwa PKI yang menjadi pelaku dari peristiwa Gerakan 30 September. Pada 4 Oktober 1965, publikasi paling awal oleh surat kabar terhadap terjadinya G30S dikeluarkan oleh *Berita Yudha* bersama dengan *Angkatan Bersendjata*. Dalam laman tajuk *Berita Yudha*, disajikan kabar bahwa Mayor Jenderal Pranoto Reksosomodra dan Mayor Jenderal Suharto menjadi dua sosok sentral dalam memulihkan stabilitas negara dan internal TNI (lihat gambar 7).



**Gambar 7.** Pemberitaan *Berita Yudha* sebagai respons terhadap terjadinya Gerakan 30 September 1965. Selain itu, laman tajuk pada surat kabar ini menampilkan beberapa surat kabar lain yang mendukung terjadinya Gerakan 30 September 1965. Sumber: *Berita Yudha* 4 Oktober 1965

Lebih lanjut, pada laman tajuk juga disajikan beberapa pemberitaan dari beberapa surat kabar lain yang terindikasi mendukung terjadinya Gerakan 30 September 1965: *Harian*

*Rakjat*, *Warta Bhakti*, dan *Suluh Indonesia* (lihat gambar 6). Akibat dari terbitan PKI yang dibalas oleh terbitan *Berita Yudha*, media yang dimiliki oleh PKI (*Harian Rakjat*, *Bintang Timur* dan *Warta Bhakti*) dilarang terbit, bahkan para wartawan *Antara* dan *Radio Republik Indonesia* yang ditengarai berhaluan kiri dan mendukung gerakan tersebut juga ikut dipecat (Suwirta, 2008: 280 & 294).

Tidak sampai di situ, *Berita Yudha* juga mencoba meyakinkan pembacanya bahwa PKI dan G30S hanya mementingkan kepentingan golongan mereka saja. Hal ini dapat dilihat pada halaman 2 terbitan 4 Oktober 1965 dengan artikel berjudul “Banyak jg. Mengaku Paling Revolusioner, Padahal Sebenarnya Penghianat<sup>2</sup> dengan Segala Hasutan<sup>2</sup> jang Ingin Menang Sendiri.” (*Berita Yudha*, 4 Oktober 1965: 2). Di halaman yang sama, *Berita Yudha* juga meyakinkan pembacanya bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan gerakan “kontra-revolusi” yang tidak sesuai dengan arah langkah politik rezim Soekarno.

Pada 7 Oktober 1965, *Berita Yudha* mendapatkan momentum yang pas untuk membendung propaganda komunis lebih jauh. Hal ini terlihat pada terbitan mereka yang pada halaman tajuk memuat informasi bahwa media yang ditengarai sebagai media afiliasi dan bersimpati terhadap PKI akan diringkus (*Berita Yudha*, 7 Oktober 1965: 1). Keputusan ini diambil sebagai imbas dari pemberitaan *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersendjata* yang mewartakan pemberitaan beberapa surat kabar yang membenarkan G30S. Tidak hanya memberitakan pelarangan terbit surat kabar-surat kabar yang terlibat dalam hegemoni

mendukung G30S, *Berita Yudha* juga mencantumkan sebuah cuplikan transkrip siaran Lembaga Kantor Berita (LKBN) *Antara* yang isinya mengawal terjadinya G30S—sekaligus mengindikasikan bahwa LKBN tersebut telah disusupi antek-antek PKI sehingga perlu dibersihkan. Selain itu, terbitan ini juga banyak mencantumkan ucapan belasungkawa dari pelbagai pihak terhadap terbunuhnya perwira-perwira TNI-AD di bagian laman iklan.

Pelarangan terbit pers di Jakarta dan sekitarnya oleh Peperda Jakarta Raya dicabut pada 6 Oktober 1965. Surat kabar-surat kabar yang sudah diperbolehkan terbit adalah *Angkatan Bersendjata*, *Berita Yudha*, *Pelopor*, *Duta Masyarakat*, *Nusa Putra*, *Mertju Suar*, *Suara Islam*, *Kompas*, *Indonesian Herald*, dan *Djakarta Dailiy Mail*. Adapun kantor berita negara, Antara, belum diperbolehkan beroperasi karena masih menunggu persetujuan Kepala Penerangan Peperda Jakarta Raya, Mayor Wirjadi (*Kompas*, 7 Oktober 1965: 1).

Dengan ditahannya pemberitaan surat kabar selain *Angkatan Bersendja* dan *Berita Yudha*, maka dua surat kabar ini menjadi pusat informasi. *Framing* yang dilakukan *Berita Yudha* dapat dikatakan berhasil mengingat surat kabar-surat kabar yang diperbolehkan terbit pada 6 Oktober 1965 dapat memberitakan G30S tanpa adanya unsur propaganda dari PKI dan media afiliasi mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diulas pada bagian sebelumnya, ditemukan fakta bahwa *Berita Yudha* mampu memanfaatkan momentum sebagai satu dari hanya dua surat kabar yang boleh terbit pasca G30S untuk

menjatuhkan pihak komunis di Indonesia melalui pemberitaan faktualnya. Agresivitas media komunis dalam memojokkan lawan-lawan politiknya menemui titik balik ketika pelarangan terbit seluruh media massa, kecuali Angkatan Bersendjata dan *Berita Yudha*. Lebih lanjut, *Berita Yudha* dapat menjalankan tugasnya dalam membantu menginformasikan situasi negara sekaligus memberitahu kepada khalayak bahwa PKI adalah dalang dari G30S 1965.

Kedekatan Soekarno dengan komunis pada perkembangannya membuat Indonesia menerapkan konsep politik Nasakom dan Manipol USDEK sebagai dasar pemerintahan. Situasi ini terjadi karena satu-satunya pihak yang selalu mendukung kebijakan politik Soekarno, terutama dalam menumpas Nekolim, adalah pihak komunis. Hal ini berimbas pada iklim pers yang membuat siapa saja yang kritis terhadap pemerintah akan ditindak secara tegas melalui pembredelan surat kabar dan penangkapan jurnalisnya.

Pendirian Badan Pendukung Sukarnoisme sebagai benteng surat kabar nonkomunis di Indonesia menjadi katalis pembentukan *Berita Yudha*. Pertentangan BPS dengan PKI pada perkembangannya membuat rezim Soekarno memilih untuk berpihak kepada PKI yang berimbas pada pembubaran BPS dan pembredelan surat kabar anggota BPS yang dianggap tidak sesuai dengan idealisme kepemimpinan Soekarno yang sudah terlalu condong pada arah komunis. *Berita Yudha* kemudian hadir sebagai penerus *Berita Indonesia* yang dibredel karena termasuk ke dalam anggota BPS. Akan tetapi, perbedaannya adalah *Berita Yudha* berada di bawah

perlindungan TNI-AD yang sedang menggalang kekuatan mereka di kancah media massa.

Terjadinya Gerakan 30 September 1965 adalah momentum Berita Yudha dalam melawan ideologi komunis dan Indonesia secara mutlak. Memanfaatkan Maklumat Penguasa Perang Daerah No. 01/Drt/10/1965, Berita Yudha dapat memberitakan G30S secara faktual sekaligus menunjukkan siapa yang menjadi dalang di balik peristiwa ini, yaitu PKI. Pemberitaan Berita Yudha terhadap terjadinya G30S 1965 merupakan titik balik dalam jurnalisme corong TNI yang terbebas dari pengaruh Nasakom rezim Soekarno. Hal tersebut karena doktrin Nasakom dan Manipol USDEK, yang menguntungkan PKI, sudah terlalu kuat di Indonesia, dan pada perkembangannya menjadi “senjata makan tuan” ketika pembunuhan perwira-perwira TNI-AD dengan dalih menyelamatkan Presiden Soekarno dari upaya kup. Framing pemberitaan Berita Yudha dilakukan dalam rangka menepis propaganda dan pembenaran PKI dalam melakukan G30S 1965, sekaligus mengawal penumpasan pihak-pihak yang G30S 1965 maupun PKI.

Dengan dilarangnya penerbitan surat kabar pendukung G30S, maka tidak ada lagi perspektif pendukung terhadap G30S. Surat kabar-surat kabar lain selain Berita Yudha yang telah diperbolehkan terbit mulai 6 Oktober 1965 dapat memberi framing terhadap G30S yang seirama dengan Berita Yudha canangkan untuk membendung propaganda komunis mengelabui masyarakat Indonesia. Berita Yudha senantiasa dapat mengarahkan dan memberikan informasi dengan framing yang menguntungkan TNI-AD,

terutama Suharto yang sedang dalam fase mengumpulkan legitimasi sebagai Presiden Republik Indonesia berikutnya setelah penandatanganan Supersemar. Hal ini dapat dilihat sejak terbitan 4 Oktober 1965 hingga seterusnya selama Oktober dengan framing yang terus memberikan pembaruan terhadap situasi penumpasan kasus G30S 1965 sekaligus memberi kabar ihwal Suharto sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)—pada perkembangannya dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965—dalam membersihkan Indonesia dari unsur komunisme dan ideologi-ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (4 Maret 1965). Djakarta staat blank: Brief uit Indonesië. *De Volkskrant*.
- Anonim. (2 Oktober 1965). Letkol Untung, Komandan Bataljon „Tjakrabirawa” menjelamatkan presiden dan RI dari kup dewan jendral. *Harian Rakjat*.
- Anonim. (2 Oktober 1965). Perintah harian Menteri/Panglima Angkatan Udara R.I.. *Harian Rakjat*.
- Anonim. (4 Oktober 1965). Perintah Pres/Pangti ABRI/PBR Bung Karno: Tjijtapan satu suasana jg tenang dan tertib, Maj. Djen. Pranoto Caretaker A.D.–Maj. Djen. Soeharto ditugaskan memulihkan ketertiban. *Berita Yudha*.
- Anonim. (4 Oktober 1965). Banyak jg. Mengaku Paling Revolusioner, Padahal Sebenarnya Penghianat<sup>2</sup> dengan Segala Hasutan<sup>2</sup> jang Ingin Menang Sendiri. *Berita Yudha*.
- Anonim. (7 Oktober 1965). Sudah boleh terbit. *Kompas*.
- Anonim. (7 Oktober 1965). Mulai 6 Okt. 65, surat<sup>2</sup> kabar pendukung “Gerakan 30 Sept.”dilarang terbit. *Berita Yudha*.
- Anonim. (8 Oktober 1965). Tadjuk *Berita Yudha*: fakta bitjara tak perlu pemutar balikan. *Berita Yudha*.

- Ariyanti, V. (2010). Kebebasan pers dalam perspektif peradilan pidana. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 1–13.
- Atmakusumah. (1980). Kasus *Indonesia Raya*. Dalam Abdurrachman Surjomihardjo (Penyunting). *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia & Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bullock, A., Trombley, S., & Lawrie, A. (2000). *The new Fontana Dictionary of Modern thought*. London: HarperCollins.
- Crouch, H. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Singapura: Equinox.
- Dinas Sejarah TNI-AD. (1972). *Cuplikan sejarah perjuangan TNI-Angkatan Darat*. Jakarta: Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat.
- Gamson, W. A. & Modigliani, A. (1987). The changing culture of Affirmative Action. *Research in Political Sociology*, 3(1), 137–177.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah*. Terjemahan: Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press
- Efendi, A. (2010). *Perkembangan pers di Indonesia*. Jakarta: Pamularsih.
- Hadi, K. (2017). *Kronik '65: Catatan hari per hari Peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya (1963–1971)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Harisman, T. A., Mulyadi, R. M., dan Nugrahanto, W. (2020). Pembredelan surat kabar *Pikiran Rakjat* tahun 1965. *Patanjala*, 12(1), 101–117.
- Hartanto, A. D. (2007). *Berita Yudha: Lolos dari dari SK No.01/Drt/10/1965*. Dalam Taufik Rahzen, dkk. *Seabad pers kebangsaan (1907–2007)*. Yogyakarta: I:BOEKOE.
- Hamidy, M. (1976). Pendaftaran ulang “Surat Izin Terbit” Pers 1975. Dalam Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. *Almanak pers “Antara” 1976*. Jakarta: Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- Howell, M., & Prevenier, W. (2001). *From reliable sources: An introduction to historical methods*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hill, D. T. (2010). *Journalism and politics in Indonesia: A critical biography of Mochtar Lubis (1922–2004) as editor and author*. London: Routledge.
- Hill, D. T. (2011). *Jurnalisme dan politik di Indonesia: Biografi kritis Mochtar Lubis (1922–2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Terjemahan: Waried Djajanto Basorie & Hanna Rambe. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hill, D. T. (2011). *Pers di masa Orde Baru*. Terjemahan: Atmakusumah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Irianto, A. M. (2014). *Media dan Kekuasaan: Antropologi Membaca Dunia Kontemporer*. Yogyakarta: Gigih Pustaka Mandiri.
- Ismaun. (2005). *Pengantar belajar sejarah sebagai ilmu dan wahana pendidikan*. Bandung: Historia Utama.
- Junaedhi, K. (1991). *Ensiklopedi pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juti. (1964). *Beladjar memahami Sukarno-isme*. Jakarta: Jajasan BP Lontarsari.
- Juwito. (2008). *Menulis berita dan feature's*. Surabaya: Unesa University Press.
- Kumar, P., & Singh, K. (2019). Media, the Fourth Pillar of Democracy: A Critical Analysis. *IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews*, 6(1), 370–378.
- Manan, B. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Mackie, J.A.C. (1974). *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia dispute 1963–1966*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lubis, Z. (1992). Mochtar Lubis itu transparan. Dalam Atmakusumah (Penyunting). *Mochtar Lubis wartawan jihad*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas
- Mohamad, G. (1984). *Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1983–1984*. Jakarta: Grafiti Press.
- Njoto. (1965). *BPS: Aksi Reaksi*. Jakarta P.T. Rakyat.
- Nurmansyah, D. (2017). Polemik artikel Beladjar Memahami Sukarnoisme karya Sayuti Melik tahun 1964. *Avatara*, 5(1), 52–66.
- Paget, R. K. (1967). Djakarta Newspapers, 1965–1967: Preliminary Comments. *Indonesia*, 4, 211–226.
- Paget, R. K. (1967). Indonesian Newspapers 1965–1967. *Indonesia*, 4, 169–210.
- Pengurus Pusat PWI. (1985). Sejarah dan hari depan pers nasional. *Pers Indonesia*, 41–42.
- Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1942–1970)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia. (2000). *Sejarah TNI Jilid III (1960–1965)*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (1960). *Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 10/1960 Tentang Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah*. Lembaran Negara No. 116 Tahun 1960. Sekretariat Negara.

- Presiden Republik Indonesia. (1963). *Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6/1963 Tentang Pembinaan Pers*. Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1963. Sekretariat Negara.
- Purwanto, S. (2020). Ganasnya Pramoedya Ananta Toer Membabat Seniman Anti PKI. Diakses pada 3 Maret 2022, dari *pwmu.co*: <https://pwmu.co/153562/06/28/ganasnya-pramoedya-ananta-toer-membabat-seniman-anti-pki/>.
- Rakhmat, M. (2015). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Bandung: Warta Bagja.
- Ricklefs, M. C. (1993). *A history of modern Indonesia since c. 1300*. London: Macmillan Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200*. New York: Palgrave Macmillan.
- Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Said, T., & Moeljanto, D. S. (1983). *Perlawanan Pers Indonesia (BPS) terhadap Gerakan PKI*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Said, T. (2019). Sekilas Sejarah Pers Nasional. Diakses pada 3 Maret 2022, dari *Persatuan Wartawan Indonesia*: <https://www.pwi.or.id/detail/26/Sekilas-Sejarah-Pers-Nasional#>.
- Saidurrahman. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan: NKRI Harga Mati edisi pertama*. Jakarta: Kencana (Prenada Media).
- Sen, K. & Hill, D. T. (2001). *Media, budaya, dan politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Arus Informasi.
- Setyahadi, M. M. (2018). Analisis konflik politik elite TNI pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). *Jurnal Renaissance*, 3(1), 346–357.
- Silalahi, H. T. (1990). *Konsensus Politik Nasional Orde Baru: Ortodoksi dan Aktualisasinya*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Simanjuntak, R., & bin Samsudin, M. (2016). Adam Malik Early Political Involvement in Indonesia (1934–1977). *Economics*, 3(6), 258–261.
- Sitompul, M. (2019). Ada Nasution di balik Dekrit Presiden. Diakses pada 5 November 2022, dari *Historia.id*: <https://historia.id/politik/articles/ada-nasution-di-balik-dekrit-presiden-v227Q/page/1>.
- Sjahril, T., & Sjureich, M. (1971). *Garis Besar Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Serikat Penerbit Surat kabar.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sjamsuddin, N. (1988). *Soekarno: Pemikiran politik dan kenyataan praktek*. Jakarta: Rajawali.
- Smith, E. C. (1986). *Pembreidelan pers di Indonesia*. Terjemahan: Atmakusumah. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soeroejo, S. (1988). *Siapa menabur angin akan menuai badai: G30S-PKI dan peran Bung Karno*. Jakarta: CV Sri Murni.
- Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965. *Sosiohumanika*, 1(2), 261–294.
- Suwirta, A., & Asnan, G. (2012). Pers: dari “kebebasan” ke “terpimpin.” Dari Taufik Abdullah & Adrian Bernard Lopian. (Penyunting). *Indonesia dalam arus sejarah: Pascarevolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Taomo, Z. (2016). Tiongkok dan G30S. Dalam Aiko Kurasawa & Toshio Matsumura (Penyunting). *G30S dan Asia: Dalam Bayang-Bayang Perang Dingin*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tjhan, S. G. (2021). *G30S dan Kejahatan Negara*. Bandung: Ultimus.
- Triwardani, R. (2010). Pembreidelan pers di Indonesia dalam perspektif politik media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 187–208.
- Umar, H. & Musavi, N. (2020). *Peran Partai Politik dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia (Studi Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Vickers, A. (2005). Vickers, Adrian (2005). *A history of modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Yuliantri, R. D. A. & Dahlan, M. M. (2008). *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950–1965*. Yogyakarta: Merakesumba.
- Zara, M. Y., & Yulianti, R. D. A. (2007). *Indonesia Raya: Berkali-kali dibreidel baru mati*. Taufik Rahzen, dkk. *Seabad pers kebangsaan (1907–2007)*. Yogyakarta: I:BOEKOE.
- Zulkifli, A. (2014). *Seri Buku Tempo: Lekra dan Geger 1965*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.